

## Perempuan dan Ekonomi Perawatan

### Catatan Jurnal Perempuan

Perempuan dan Ekonomi Perawatan

### Artikel

Meninjau Kembali Tren Partisipasi Angkatan kerja Perempuan di Indonesia

*Ariane J. Utomo*

Kompleksitas Kerja Perempuan dengan HIV Positif: Studi Kasus di DKI Jakarta

*Andi Nur Faizah*

Menakar Otonomi Perempuan Kepala Keluarga dalam Kegiatan Simpan Pinjam di Sebuah Lembaga Keuangan Mikro

*Linda Yuliantini*

Bekerja, Berumah Tangga dan Berorganisasi: Sistem Patriarki dalam Tiga Ruang Hidup Perempuan

*Indrasari Tjandraningsih*

Pekerja Perempuan dalam Pasar Tenaga Kerja Indonesia: Marginalisasi Yang Tak Terhindarkan

*Poppy Ismalina*

Ekonomi Perawatan dan Beban Kerja Ibu Rumah Tangga di Indonesia

*Atnike Nova Sigiro, Alfindra Primaldhi & Bagus Takwin*

Diterbitkan oleh:

YAYASAN  
**YJP**  
JURNAL  
PEREMPUAN

Yayasan Jurnal Perempuan  
No. Akreditasi: 748/Akred/P2MI-LIPI/04/2016

# Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp 9.200,-. Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus-menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya berolah kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 Sahabat Jurnal Perempuan. Bergabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Mahasiswa S1 : Rp 150.000,-/tahun
- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

**- Bank Mandiri Cabang Jatipadang atas nama Yayasan Jurnal Perempuan Indonesia  
No. Rekening 127-00-2507969-8**

(Mohon bukti transfer diemail ke [ima@jurnalperempuan.com](mailto:ima@jurnalperempuan.com))

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: [www.jurnalperempuan.org](http://www.jurnalperempuan.org)

Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Himah Sholihah (Hp 081807124295,  
email: [ima@jurnalperempuan.com](mailto:ima@jurnalperempuan.com)).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada tanggal 1 setiap bulannya di website kami [www.jurnalperempuan.org](http://www.jurnalperempuan.org) dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

**Gadis Arivia**

(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

**PENDIRI**

Dr. Gadis Arivia  
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno  
Ratna Syafrida Dhanny  
Asikin Arif (Alm.)

**DEWAN PEMBINA**

Dr. Gadis Arivia  
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno  
Mari Elka Pangestu, Ph.D.  
Svida Alisjahbana

**DIREKTUR EKSEKUTIF**

Dr. Atnike Nova Sigirow

**PEMIMPIN REDAKSI**

Anita Dhewy, M.Si.

**DEWAN REDAKSI**

Atnike Nova Sigirow, M.Sc. (Pascasarjana Diplomasi, Universitas Paramadina)  
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)  
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)  
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universitaet van Amsterdam)  
Prof. Dr. Musdah Mulia (Pemikiran Politik Islam & Gender, UIN Syarif Hidayatullah)  
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL Universitas Indonesia)  
Mariana Amiruddin, M.Hum. (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)  
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)  
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)

**MITRA BESTARI**

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender, Universitas Indonesia)  
David Hulse, PhD (Politik & Gender, Ford Foundation)  
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas Airlangga)  
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)  
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas Indonesia)  
Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan, University of Melbourne)  
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern University)  
Ro'fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)  
Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies University of Western Australia)  
Prof. Kim Eun Shil (Antropologi & Gender, Korean Ewha Womens University)  
Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender, Carleton University)

Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universitaet Marburg)

Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan Masyarakat & Gender, Auckland University of Technology)

Dr. Wening Udasmoro (Budaya, Bahasa & Gender, Universitas Gajah Mada)

Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama University)

Dr. Antarini Pratiwi Arna (Hukum & Gender, Indonesian Scholarship and Research Support Foundation)

Dr. Widjajanti M Santoso (Gender, Sosiologi & Media, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)

Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo (Hukum & Gender, Universitas Indonesia)

Francisca Saveria Sika Ery Seda, Ph.D. (Sosiologi, Gender & Kemiskinan, Universitas Indonesia)

Ruth Indiah Rahayu, M. Fil. (Sejarah, Gender & Filsafat, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara)

Prof. Maria Lichtmann (Teologi Kristen dan Feminisme, Appalachian State University, USA)

Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University California, Riverside)

Assoc. Prof. Mun'im Sirry (Teologi Islam & Gender, University of Notre Dame)

Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender, Universiteit van Amsterdam)

Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender, Goethe University Frankfurt)

Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia & Gender, University of Copenhagen)

**REDAKSI PELAKSANA**

Andi Misbahul Pratiwi, M.Si.

**SEKRETARIS REDAKSI**

Abby Gina Boangmanalu, M.Hum.

**REDAKSI**

Bella Sandiata, M.H.  
Iqraa Runi Aprilia

**SEKRETARIAT DAN SAHABAT JURNAL PEREMPUAN**

Himah Sholihah  
Gery Andri Wibowo  
Hasan Ramadhan

**DESAIN & TATA LETAK**

Dina Yulianti

**ALAMAT REDAKSI :**

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A, Jati Padang  
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540  
Telp./Fax (021) 2270 1689  
E-mail: [yjp@jurnalperempuan.com](mailto:yjp@jurnalperempuan.com)  
[redaksi@jurnalperempuan.com](mailto:redaksi@jurnalperempuan.com)

**WEBSITE:**

[indonesianfeministjournal.org](http://indonesianfeministjournal.org)

Cetakan Pertama, November 2018

## Daftar Isi

### Catatan Jurnal Perempuan

Perempuan dan Ekonomi Perawatan / *Women and The Care Economy* ..... iii

### Artikel / Articles

- Meninjau Kembali Tren Partisipasi Angkatan kerja Perempuan di Indonesia / *Revisiting the Trends of Female Labour Force Participation in Indonesia* ..... 193-202  
*Ariane J. Utomo*
- Kompleksitas Kerja Perempuan dengan HIV Positif: Studi Kasus di DKI Jakarta / *The Complexity of Work for Women who are HIV Positive: A Case Study in DKI Jakarta* ..... 203-213  
*Andi Nur Faizah*
- Menakar Otonomi Perempuan Kepala Keluarga dalam Kegiatan Simpan Pinjam di Sebuah Lembaga Keuangan Mikro / *Measuring the Autonomy of Female Family Heads in Savings and Loans Activities at a Microfinance Institution* ..... 215-226  
*Linda Yuliantini*
- Bekerja, Berumah Tangga dan Berorganisasi: Sistem Patriarki dalam Tiga Ruang Hidup Perempuan / *Working, Housekeeping and Organizing: The Patriarchal System in Three Women's Living Spaces* ..... 227-233  
*Indrasari Tjandraningsih*
- Pekerja Perempuan dalam Pasar Tenaga Kerja Indonesia: Marginalisasi Yang Tak Terhindarkan / *Women Workers in the Indonesian Labor Market: Inevitable Marginalization* ..... 235-247  
*Poppy Ismalina*
- Ekonomi Perawatan dan Beban Kerja Ibu Rumah Tangga di Indonesia / *Care Economy and the Burden of Housewives' Work in Indonesia* ..... 249-258  
*Atnike Nova Sigiro, Alfindra Primaldhi & Bagus Takwin*

## Perempuan dan Ekonomi Perawatan *Women and The Care Economy*

**D**ua dasawarsa terakhir kita menyaksikan tingginya permintaan terhadap tenaga kerja di sektor perawatan. Perempuan-perempuan dari desa dan daerah terpencil bermigrasi menuju kota-kota besar di dalam dan di luar negeri. Mereka menjadi pekerja rumah tangga, mengasuh anak-anak, merawat orang-orang lansia, memasak makanan dan membersihkan rumah. Mereka melakukan pekerjaan yang selama ini dikenal sebagai kerja perawatan tak berbayar.

Dalam konteks ekonomi pasar, kerja perawatan/pengasuhan yang umumnya dilakukan perempuan dipandang bukan merupakan kerja produktif yang berkontribusi terhadap ekonomi. Itu sebabnya kerja perawatan diserahkan kepada rumah tangga untuk pengaturannya. Akibatnya, kerja perawatan dalam rumah tangga individu biasanya tidak dibayar, tidak diakui dan mendapat sedikit dukungan. Konsekuensi lainnya ketika kerja perawatan diberikan dalam kontrak, ia tidak hanya dibayar rendah, tetapi juga tidak diatur, tidak aman dan penuh eksploitasi.

Kenyataannya kerja perawatan tak berbayar merupakan faktor yang sangat penting dalam menyokong ekonomi berbayar. Ia menyuplai kebutuhan sehari-hari pekerja dan menyubsidi reproduksi pekerja untuk akumulasi modal.

Meski banyak dibicarakan hingga kini belum ada definisi baku tentang ekonomi perawatan. Secara umum ekonomi perawatan mengacu pada sektor kegiatan ekonomi, baik yang dibayar maupun yang tak

dibayar, terkait dengan penyediaan perawatan sosial dan material. Ia mencakup perawatan untuk anak-anak, orang tua, dan orang cacat, perawatan kesehatan, pendidikan, juga rekreasi dan layanan pribadi lainnya, yang semuanya berkontribusi untuk memelihara dan mendukung populasi sekarang dan masa depan.

Perawatan menjadi perhatian utama feminis karena pengaturannya sangat berbasis gender dan berimplikasi pada hal-hal yang dapat dilakukan laki-laki dan perempuan. Norma-norma sosial yang mengaitkan perempuan dengan kepedulian pada sesama memiliki konsekuensi ekonomi yang signifikan yang berkontribusi terhadap ketidaksetaraan gender baik dalam rumah tangga maupun dalam pasar tenaga kerja (Badgett & Folbre 1999). Pemisahan perempuan ke dalam kerja-kerja perawatan misalnya, turut menjelaskan bertahannya perbedaan upah berdasarkan gender.

Untuk itu ada kebutuhan atas kontrak sosial baru guna mendefinisikan ulang hubungan gender. Selain itu mengacu pada Lynch (2009) penting juga mempertimbangkan peran negara. Negara perlu mengambil tanggung jawab untuk memastikan bahwa kerja perawatan tidak mengarah pada kemiskinan dan eksklusi sosial. Ia harus dikeluarkan dari ranah privat dan dibingkai sebagai tanggung jawab bersama. Di bawah kontrak sosial yang dinegosiasikan ini setiap individu yang terlibat kerja perawatan akan memiliki berbagai hak ekonomi sosial yang dipenuhi oleh negara, bukan oleh anggota keluarga. (**Anita Dhewy**)



---

Ariane J. Utomo (School of Geography, The University of Melbourne, Melbourne, Australia)

**Meninjau Kembali Tren Partisipasi Angkatan kerja Perempuan di Indonesia**

***Revisiting the Trends of Female Labour Force Participation in Indonesia***

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 23 No. 4, November 2018, hal. 193-202, 1 tabel, 4 gambar, 23 daftar pustaka

There are two problems that often emerge in public discussions about the recent trends in the level of participation of the female labor force in Indonesia. The first is the low Indonesian female labour force participation rate (FLFPR) compared to other ASEAN countries. The second is the trend of stagnation of Indonesian FLFPR—at around 51%—over almost three decades. By reviewing cross-country data from the Global Gender Gap Index and the International Labor Organization, this article rests on the argument that the two features of Indonesian FLFPR are not merely bad news, and should be read in the context of large economic growth and social change in Indonesia. But a more critical and thorough interpretation of the trend of this indicator does not deny the fact that there is still wide room to improve women's economic participation and opportunity in Indonesia.

Keywords: demographics, female labor force participation rates, employment statistics, social change, economic development, ASEAN, Gender Gap Index

Ada dua masalah yang sering muncul dalam diskusi publik soal tren tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (TPAKP) di Indonesia akhir-akhir ini. Yang pertama adalah rendahnya TPAKP Indonesia dibanding negara ASEAN lain. Yang kedua adalah tren stagnasi TPAKP Indonesia—pada kisaran 51%—dalam hampir tiga dasawarsa terakhir. Dengan meninjau kembali data lintas negara dari Indeks Kesenjangan Gender Global dan International Labor Organisation, artikel ini bertumpu pada argumen bahwa kedua fitur TPAKP Indonesia tersebut bukan semata-mata kabar buruk, dan sebaiknya dibaca dalam konteks besar pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial di Indonesia. Namun penafsiran yang lebih kritis dan saksama terhadap tren indikator ini tidak menampik fakta bahwa masih ada ruang lebar untuk memperbaiki partisipasi dan kesempatan ekonomi perempuan di Indonesia.

Kata kunci: demografi, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan, statistik ketenagakerjaan, perubahan sosial, pembangunan ekonomi, ASEAN, Indeks Kesenjangan Gender

---

Andi Nur Faizah (Program Studi Kajian Gender, Sekolah Kajian Strategik dan Global, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia)

**Kompleksitas Kerja Perempuan dengan HIV Positif: Studi Kasus di DKI Jakarta**

***The Complexity of Work for Women who are HIV Positive: A Case Study in DKI Jakarta***

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 23 No. 4, November 2018, hal. 203-213, 10 daftar pustaka

The phenomenon of HIV-AIDS transmission places women in a difficult situation. The loss of family members such as husbands due to AIDS

leaves women living with HIV positive in a struggle to access sources of livelihood. The condition of themselves as PLWHA, concerns about being stigmatized, caring for family members, and earning a living are the burdens of life they have to face. In this regard, this paper explores the complexity of the work of HIV-positive women. This study uses a qualitative method with a feminist perspective to get a complete picture of the livelihood of HIV-positive women. Based on interviews with five HIV-positive women, the findings found a link between social, identity, and gender categories that affect their livelihoods. HIV-positive women also transform themselves into their "normal" self by pretending to be healthy, able to work, have quality, and be independent. This is done as a form of resistance to the stigma attached to PLWHA.

Keywords: multi-layered burden, livelihood, HIV-positive women, stigma

Fenomena penularan HIV-AIDS menempatkan perempuan pada situasi yang sulit. Kehilangan anggota keluarga seperti suami akibat AIDS membuat perempuan yang hidup dengan HIV positif harus berjuang guna mengakses sumber-sumber penghidupan. Kondisi diri sebagai ODHA, kekhawatiran mendapatkan stigma, mengasuh anggota keluarga, serta mencari nafkah adalah beban hidup dan beban kerja yang mereka hadapi. Berkaitan dengan hal tersebut, tulisan ini menggali kompleksitas kerja perempuan dengan HIV positif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berperspektif feminis guna mendapatkan gambaran utuh mengenai penghidupan perempuan dengan HIV positif. Berdasarkan wawancara pada lima orang perempuan dengan HIV positif, didapat temuan adanya keterkaitan antara kategori sosial, identitas, dan gender yang memengaruhi penghidupan mereka. Perempuan dengan HIV positif juga melakukan transformasi sebagai diri yang "normal" dengan menunjukkan diri sebagai sosok yang sehat, mampu bekerja, memiliki kualitas, serta mandiri. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk perlawanan terhadap stigma yang dilekatkan pada ODHA.

Kata kunci: beban berlapis, penghidupan, perempuan dengan HIV positif, stigma

---

Linda Yuliantini (Program Studi Kajian Gender, Sekolah Kajian Strategik dan Global, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia)

**Menakar Otonomi Perempuan Kepala Keluarga dalam Kegiatan Simpan Pinjam di sebuah Lembaga Keuangan Mikro**

***Measuring the Autonomy of Female Family Heads in Savings and Loans Activities at a Microfinance Institution***

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 23 No. 4, November 2018, hal. 215-226, 2 tabel, 1 gambar, 20 daftar pustaka

It is important to study the autonomy of women's autonomy, because it is relational, multidimensional and influences the lives of women, especially regarding actions and decision-making in all aspects of their lives. This research explores the autonomy of female household heads (PEKKA) in savings and loan activities at a microfinance institution both individually and collectively. Pekka's individual autonomy is seen in the context of power through *power within*, *power to*, and *power over*, while collective autonomy is in line with the *power with* concept offered by Linda Mayoux. This study uses a qualitative approach with a female perspective. Data collection was conducted through in-depth interviews with five subjects that were selected purposively. The results showed that participation in savings and credit activities increased the autonomy of individual female heads of household more significantly compared to collective autonomy in groups.

Keywords: female head of household, individual autonomy, collective autonomy, savings and loans

Otonomi perempuan penting untuk dikaji, karena bersifat relasional, multidimensi serta berpengaruh terhadap kehidupan perempuan terutama terkait tindakan dan pengambilan keputusan dalam segala aspek kehidupan mereka. Penelitian ini menggali otonomi perempuan kepala keluarga dalam kegiatan simpan pinjam di sebuah lembaga keuangan mikro baik secara individu maupun kolektif. Otonomi individu Pekka dilihat dalam konteks kekuasaan melalui power within, power to, dan power over, sedangkan otonomi kolektif sejalan dengan konsep power with yang ditawarkan oleh Linda Mayoux. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berperspektif perempuan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap lima subjek yang dipilih secara purposive. Hasil penelitian menunjukkan partisipasi dalam kegiatan simpan pinjam meningkatkan otonomi individu perempuan kepala keluarga secara lebih signifikan dibandingkan dengan otonomi kolektif dalam kelompok.

Kata kunci: perempuan kepala keluarga, otonomi Individual, otonomi kolektif, simpan pinjam

---

Indrasari Tjandraningsih (Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, Indonesia)

### **Bekerja, Berumah Tangga dan Berorganisasi: Sistem Patriarki dalam Tiga Ruang Hidup Perempuan**

#### ***Working, Housekeeping and Organizing: The Patriarchal System in Three Women's Living Spaces***

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 23 No. 4, November 2018, hal. 227-233, 13 daftar pustaka

This paper discusses women's labor activities in trade union and the obstacles they encounter. The discussion focuses on the three roles carried out by women factory workers in domestic space as mothers and wives and in public space as laborers as well as activists of labor organizations. The information in this paper derived from observations of women factory workers' activities in union organization and two ethnographic books on factory workers' resistance. The subject was chosen because for more than two decades there was no significant changes in the position of women in the labor movement. The research questions of this paper are what are the obstacles for women workers to work and organize like male workers? Why are male workers so dominant, even in industries where the workforce is mostly women? How can women play the role as mothers, as workers and as leaders of labor organizations? The results of the analysis show the role and stereotype of gender in patriarchal societies within labor organizations is a barrier for women to become a significant player in the labor movement. However, strong determination for women to fight injustice supported by personal qualities proves that women are able to perform in the triple activities all at once.

Keywords: women factory workers, patriarchal society, gender role, trade union

Tulisan ini membahas aktivitas buruh perempuan dalam organisasi serikat pekerja dan hambatan-hambatan yang dihadapi. Pembahasan berfokus pada tiga peran yang dijalankan perempuan buruh pabrik di ruang domestik sebagai ibu dan istri dan di ruang publik sebagai buruh sekaligus aktivis organisasi buruh. Informasi dalam tulisan ini berasal dari amatan terhadap kegiatan berorganisasi perempuan buruh di serikat buruh dan dua buah buku bernuansa etnografis mengenai perlawanan buruh pabrik. Subjek dipilih karena selama lebih dari dua dekade tidak ada perubahan signifikan atas posisi perempuan dalam gerakan buruh. Pertanyaan yang hendak dijawab dalam tulisan ini adalah apa yang menjadi hambatan bagi buruh perempuan untuk bekerja dan berorganisasi seperti halnya buruh laki-laki? Mengapa buruh laki-laki begitu dominan pengaruhnya meskipun di industri yang tenaga kerjanya sebagian besar perempuan? Bagaimana para perempuan mampu menjalankan peran sebagai ibu, pekerja dan

sekaligus pimpinan organisasi buruh? Hasil analisis menunjukkan peran dan stereotip gender dalam masyarakat patriarkal di lingkungan organisasi buruh merupakan hambatan bagi perempuan untuk secara signifikan menjadi pemain utama dalam gerakan buruh. Akan tetapi determinasi yang kuat pada perempuan untuk melawan ketidakadilan didukung dengan kualitas personal membuktikan perempuan mampu berkegiatan dalam tiga arena sekaligus.

Kata kunci: buruh perempuan di pabrik, masyarakat patriarkis, peran gender, organisasi buruh

---

Poppy Ismalina (Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia)

### **Pekerja Perempuan dalam Pasar Tenaga Kerja Indonesia: Marginalisasi Yang Tak Terhindarkan**

#### ***Women Workers in the Indonesian Labor Market: Inevitable Marginalization***

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 23 No. 4, November 2018, hal. 235-247, 2 tabel, 9 gambar, 14 daftar pustaka

By conducting descriptive statistical analysis and the establishment of two econometric models, this study proves that the marginalization of women in the Indonesian labor market still occurs even though the quality of Indonesian women from the level of education and work participation is increasing. The phenomenon of marginalization of women is characterized by 1) the wage gap due to gender differences, namely the wages received by female workers are lower than male workers for all types of work; 2) the chances of men to find work are far higher than women in the Indonesian labor market. The study concludes that the wage gap due to gender differences is not due to competition in the labor market but rather due to the assumption that working women are secondary and supplementary breadwinners in their households, and the role that they can play is only an extension of their domestic role. Thus, the main cause of the marginalization of women in the labor market is the low awareness of gender equality, something which has already taken root in Indonesia.

Keywords: marginalization of women, labor market, wage gap, gender inequality

Dengan melakukan analisis statistik deskriptif dan pembentukan dua model ekonometrika, studi ini membuktikan bahwa marginalisasi perempuan dalam pasar tenaga kerja Indonesia masih terjadi meskipun kualitas perempuan Indonesia dari tingkat pendidikan dan partisipasi kerja makin meningkat. Fenomena marginalisasi perempuan ditandai dengan 1) kesenjangan upah akibat perbedaan gender yang makin tinggi yakni upah yang diterima oleh pekerja perempuan lebih rendah daripada pekerja laki-laki untuk semua jenis pekerjaan; 2) peluang laki-laki untuk bekerja jauh lebih tinggi daripada perempuan di pasar tenaga kerja Indonesia. Studi pustaka menyimpulkan bahwa kesenjangan upah akibat perbedaan gender bukan disebabkan persaingan di pasar tenaga kerja tetapi lebih disebabkan adanya anggapan bahwa perempuan yang bekerja adalah pencari nafkah sekunder dan pelengkap di rumah tangganya dan peran yang dapat dimainkan hanyalah perpanjangan peran domestiknya. Dengan demikian, akar masalah dari marginalisasi perempuan di pasar tenaga kerja adalah rendahnya kesadaran akan kesetaraan gender dan ini telah mengakar di Indonesia.

Kata kunci: marginalisasi perempuan, pasar tenaga kerja, kesenjangan upah, ketidakadilan gender

---

<sup>1</sup>Atnike Nova Sigiro, <sup>2</sup>Alfindra Primaldhi & <sup>3</sup>Bagus Takwin (Jurnal Perempuan, Jakarta, Indonesia & <sup>2</sup>Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Depok, Indonesia & <sup>3</sup>Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Depok, Indonesia)

## **Ekonomi Perawatan dan Beban Kerja Ibu Rumah Tangga di Indonesia**

### ***Care Economy and the Burden of Housewives' Work in Indonesia***

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 23 No. 4, November 2018, hal. 249-258, 1 tabel, 8 gambar, 12 daftar pustaka

Social reproduction role by women are mostly unpaid, which are done in the context of social relation within household or family. In the context of macro economy, care work for family are often overlooked, furthermore are often not being considered as productive work that contribute to the economy. This situation bring overburden to women and the lack of appreciation toward care work in Indonesia. This article was written based on a national survey conducted in 2018 in 34 provinces in Indonesia. The survey measured the care work's burden of housewives, and public perception towards care economy that are run by housewives in Indonesia.

Keywords: care work, care economy, social reproduction, housewives

Peran reproduksi sosial yang dijalankan oleh perempuan sebagian besar merupakan kerja tidak berbayar (*unpaid*) yang dilakukan dalam kerangka relasi sosial seperti rumah tangga atau keluarga. Dalam konteks ekonomi makro, kerja perawatan (*care work*) di dalam keluarga ini masih luput dari perhitungan, bahkan tidak dianggap sebagai kerja produktif yang memiliki kontribusi terhadap ekonomi. Hal ini berdampak pada beban kerja yang terlalu besar kepada perempuan dan kurangnya penghargaan kepada kerja perawatandi Indonesia. Artikel ini berangkat dari hasil survei nasional tahun 2018 di 34 provinsi di Indonesia. Survei tersebut mengukur beban kerja perawatan ibu rumah tangga, dan persepsi masyarakat terhadap ekonomi perawatan yang dilakukan oleh ibu rumah tangga di Indonesia.

Kata kunci: kerja perawatan, ekonomi perawatan, reproduksi sosial, ibu rumah tangga



## Meninjau Kembali Tren Partisipasi Angkatan kerja Perempuan di Indonesia

### *Revisiting the Trends of Female Labour Force Participation in Indonesia*

**Ariane J. Utomo**

School of Geography, The University of Melbourne  
Level 1, 221 Bouverie Street, The University of Melbourne, Carlton Victoria, Australia 3053

ariane.utomo@unimelb.edu.au

Kronologi Naskah: diterima 9 Oktober 2018, direvisi 13 November 2018, diputuskan diterima 27 November 2018

#### Abstract

There are two problems that often emerge in public discussions about the recent trends in the level of participation of the female labor force in Indonesia. The first is the low Indonesian female labour force participation rate (FLFPR) compared to other ASEAN countries. The second is the trend of stagnation of Indonesian FLFPR—at around 51%—over almost three decades. By reviewing cross-country data from the Global Gender Gap Index and the International Labor Organization, this article rests on the argument that the two features of Indonesian FLFPR are not merely bad news, and should be read in the context of large economic growth and social change in Indonesia. But a more critical and thorough interpretation of the trend of this indicator does not deny the fact that there is still wide room to improve women's economic participation and opportunity in Indonesia.

Keywords: demographics, female labor force participation rates, employment statistics, social change, economic development, ASEAN, Gender Gap Index

#### Abstrak

Ada dua masalah yang sering muncul dalam diskusi publik soal tren tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (TPAKP) di Indonesia akhir-akhir ini. Yang pertama adalah rendahnya TPAKP Indonesia dibanding negara ASEAN lain. Yang kedua adalah tren stagnasi TPAKP Indonesia—pada kisaran 51%—dalam hampir tiga dasawarsa terakhir. Dengan meninjau kembali data lintas negara dari Indeks Kesenjangan Gender Global dan International Labor Organisation, artikel ini bertumpu pada argumen bahwa kedua fitur TPAKP Indonesia tersebut bukan semata-mata kabar buruk, dan sebaiknya dibaca dalam konteks besar pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial di Indonesia. Namun penafsiran yang lebih kritis dan saksama terhadap tren indikator ini tidak menampik fakta bahwa masih ada ruang lebar untuk memperbaiki partisipasi dan kesempatan ekonomi perempuan di Indonesia.

Kata kunci: demografi, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan, statistik ketenagakerjaan, perubahan sosial, pembangunan ekonomi, ASEAN, Indeks Kesenjangan Gender

#### Pendahuluan

Sejak tahun 2006, The World Economic Forum mengeluarkan Indeks Kesenjangan Gender (IKG – *Gender Inequality Index*) tahunan untuk berbagai negara. Indeks ini digunakan untuk membandingkan besarnya angka kesenjangan berbasis gender antarnegara, dan tren perubahannya dari masa ke masa (World Economic Forum 2017). Secara umum, IKG terdiri dari dua indikator primer: angka kesenjangan gender suatu negara (skor) dan peringkat antar negara (ranking). Kedua indikator ini dihitung berdasarkan angka kesenjangan gender dalam empat dimensi utama: pencapaian pendidikan, kesehatan dan kelangsungan hidup, pemberdayaan politik, dan partisipasi dan kesempatan ekonomi.

Dalam IKG, angka kesenjangan gender berkisar antara 0 dan 1. Angka 1 mencerminkan kondisi paritas,

dimana pencapaian penduduk laki-laki dan perempuan dalam satu dimensi pengukuran adalah sama. Sebaliknya, angka 0 mencerminkan imparitas total. Dari perhitungan tersebut, peringkat antarnegara ditentukan. Semakin rendah peringkat suatu negara, semakin besar kesenjangan gender multidimensi negara tersebut dibanding negara-negara lain.

Pada tahun 2017, Indonesia mendapat peringkat 81 dari 144 negara di dunia (Tabel 1). Peringkat ini berada di bawah negara-negara Asia Tenggara lainnya. Di Asia Tenggara, peringkat terbaik dicapai Filipina (peringkat 10), diikuti Laos (64), Singapura (65), Vietnam (69), Thailand (75), dan Myanmar (83). Menurut peringkat IKG tahun tersebut, hanya tiga negara anggota ASEAN lain yang mendapat peringkat lebih rendah dari Indonesia: Kamboja (99), Brunei Darussalam (103), dan Malaysia (104).

Apa yang membuat peringkat IKG Indonesia relatif rendah di antara negara-negara tetangga? Dibanding Laos, Myanmar, Vietnam, bahkan Singapura, Indonesia sebenarnya lebih mumpuni dalam pencapaian kesetaraan gender dalam tiga dimensi: pendidikan, kesehatan, dan politik. Dibanding Thailand, Indonesia mendapat skor lebih baik dalam dimensi pendidikan dan politik. Dalam hitungan IKG 2017, rendahnya partisipasi dan kesempatan ekonomi perempuanlah yang membuat Indonesia mendapat skor dan peringkat lebih rendah dari kelima negara tetangga tersebut. Memang, dari sepuluh negara anggota ASEAN, Indonesia mendapat skor paling buruk untuk dimensi ekonomi ini.

Berangkat dari permasalahan di atas, artikel ini menelaah lebih jauh tentang pola dan tantangan seputar peningkatan partisipasi ekonomi perempuan di Indonesia. Khususnya, artikel ini bertumpu pada salah satu indikator—Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAKP)—yang lazim digunakan untuk mengukur dan memahami lebih jauh tentang pola partisipasi dan kesempatan ekonomi perempuan.

Setidaknya, ada dua masalah yang sering muncul dalam diskusi publik soal tren TPAKP di Indonesia akhir-akhir ini.<sup>1</sup> Yang pertama—seperti disorot di paragraf sebelumnya—adalah rendahnya TPAKP Indonesia dibanding negara ASEAN lain. Yang kedua adalah kajian-kajian kebijakan yang menemukan adanya tren stagnasi TPAKP. Tren stagnasi TPAKP rancu diartikan sebagai tidak adanya kemajuan dalam akses partisipasi ekonomi perempuan Indonesia secara umum dalam beberapa dasawarsa terakhir.

Artikel ini mengajak pembaca untuk lebih saksama dalam penafsiran tren partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia. Bertolak dari pendekatan ilmu kependudukan (demografi), pembahasan tren seputar partisipasi ekonomi dan angkatan kerja perempuan mengacu pada indikator-indikator lintas negara dan lintas waktu dari International Labor Organisation (<https://www.ilo.org/ilostat/>), dan data indeks kesenjangan gender lintas negara dari World Economic Forum Global Gender Gap Report 2017 (<https://www.weforum.org/reports/the-global-gender-gap-report-2017>).

Artikel dimulai dengan membahas konsep dan definisi indikator-indikator kunci dalam pembahasan. Bagian pertama pembahasan menilik ulang soal skor dan peringkat partisipasi ekonomi perempuan Indonesia dalam hitungan IKG di atas. Sebagai titik fokus analisis, bagian ini mengupas perbedaan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan, dan perbedaan pola

antarkelompok umur antarnegara ASEAN. Bagian kedua mengupas hasil berbagai kajian terkait seputar tren “stagnasi” pada TPAKP di Indonesia.

Dua bagian pembahasan ini berargumen bahwa rendahnya peringkat relatif Indonesia dalam dimensi ekonomi IKG dan tren stagnasi TPAKP tidak semata-mata kabar buruk, dan sebaiknya dibaca dalam konteks besar pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial di Indonesia. Namun tidak dapat dipungkiri, memang ada isu struktural mendasar yang menyulitkan perempuan untuk berpartisipasi dalam angkatan kerja di Indonesia, terutama setelah mereka mempunyai anak. Bagian terakhir mengurai singkat bagaimana tantangan terkait pola perubahan sosial, ekonomi dan demografi patut diperhatikan oleh pemangku kebijakan, guna memperlebar akses partisipasi ekonomi perempuan dan meningkatkan kesejahteraan di masa datang.

## Konsep dan Definisi

Seperti diulas di bagian pendahuluan, Indonesia mendapat skor terendah, dan peringkat terbawah dalam dimensi partisipasi dan kesempatan ekonomi di ASEAN menurut IKG 2017 (Tabel 1). Sebelum mengkaji lebih jauh mengapa performa Indonesia lebih buruk dibanding negara ASEAN lain dalam peringkat dimensi ekonomi IKG, mari kita telisik konsep dan definisi yang digunakan untuk perhitungan terkait.

Dalam IKG versi World Economic Forum, skor kesenjangan gender dalam dimensi ekonomi dan partisipasi ekonomi suatu negara terdiri dari lima komponen. Pertama, perbandingan partisipasi angkatan kerja antara laki-laki dan perempuan. Kedua, rasio upah antar laki-laki dan perempuan untuk jenis pekerjaan yang sama. Ketiga, rasio penghasilan antar laki-laki dan perempuan (dalam hitungan paritas daya beli US dolar). Keempat, proporsi perempuan di antara legislator, pejabat senior, dan manager. Kelima, proporsi perempuan di antara pekerja profesional dan teknis.

Komponen pertama dalam dimensi ekonomi IKG dihitung berdasarkan sebuah indikator yang umum digunakan dalam berbagai kajian ketenagakerjaan: *Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja* (TPAK – *Labour Force Participation Rate*). Secara konseptual, *angkatan kerja* (*labour force*) adalah jumlah penduduk usia kerja yang mampu, bersedia, dan siap untuk berkontribusi pada produksi barang dan jasa dalam perekonomian suatu negara/wilayah. Definisi usia kerja sendiri bervariasi dari satu negara ke negara lain. Yang lazim digunakan

untuk komparasi internasional adalah penduduk usia 15 tahun ke atas. Dalam konsep angkatan kerja ini, yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja/dipekerjakan dan/atau yang secara aktif mencari pekerjaan dalam kurun waktu yang ditentukan sebuah survei/sensus di suatu wilayah. Dengan kata

lain, pengangguran yang sedang mencari pekerjaan dan siap untuk bekerja akan dihitung sebagai angkatan kerja. Namun anak-anak, pelajar penuh waktu, ibu/bapak rumah tangga, dan pensiunan tidak termasuk dalam angkatan kerja.

**Table 1: Angka Kesenjangan Gender dan Peringkat Negara ASEAN, Global Gender Inequality Index 2017**

Negara	Indeks Global		Partisipasi dan Kesempatan Ekonomi		Pencapaian Pendidikan		Kesehatan dan Kelangsungan Hidup		Pemberdayaan Politik	
	Peringkat	Skor	Peringkat	Skor	Peringkat	Skor	Peringkat	Skor	Peringkat	Skor
Filipina	10	0.79	25	0.764	1	1	36	0.979	13	0.416
Laos	64	0.703	22	0.769	118	0.933	74	0.974	87	0.137
Singapura	65	0.702	27	0.752	94	0.977	101	0.971	101	0.11
Vietnam	69	0.698	33	0.738	97	0.972	138	0.957	97	0.124
Thailand	75	0.694	24	0.767	106	0.958	51	0.978	127	0.072
Myanmar	83	0.691	26	0.754	95	0.975	66	0.976	132	0.059
Indonesia	84	0.691	108	0.61	88	0.986	60	0.976	63	0.193
Cambodia	99	0.676	56	0.698	121	0.921	1	0.98	106	0.104
Brunei Darussalam	102	0.671	61	0.692	78	0.99	111	0.969	140	0.031
Malaysia	104	0.67	87	0.654	77	0.991	53	0.977	133	0.058

Sumber: Data untuk negara ASEAN dari Table 3: Global Rankings 2017, hh. 10-11; World Economic Forum 2017, *The Global Gender Gap Report 2017*, dilihat 1 Oktober 2018, [http://www3.weforum.org/docs/WEF\\_GGGR\\_2017.pdf](http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2017.pdf)

Tentunya, ada banyak kritik seputar definisi siapa saja yang termasuk/bukan termasuk angkatan kerja. Beberapa ekonom dan feminis mengkritik konsep angkatan kerja yang sama sekali tidak menghitung kontribusi pekerjaan reproduktif perempuan terhadap pembangunan ekonomi (Beneria 1981; Folbre 2006; Waring & Steinem 1988). Tanpa mengesampingkan kajian-kajian kritis selama ini, untuk mempermudah komparasi antar negara, artikel ini tetap menggunakan definisi standar angkatan kerja seperti yang digunakan World Economic Forum, dan berbagai lembaga nasional dan internasional lainnya.

Definisi *Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja* adalah persentase penduduk usia kerja yang bekerja dan/atau mencari pekerjaan, dari seluruh penduduk usia kerja di suatu wilayah. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja ini dapat dihitung secara terpisah untuk berbagai kelompok penduduk (contoh: jenis kelamin, wilayah tinggal, umur, pendidikan tertinggi, dan lain-lain), dan subkelompok penduduk (contoh: TPAK perempuan Indonesia umur 25-29 yang tinggal di daerah pedesaan).

*Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan* (TPAKP – *Female Labour Force Participation Rate* – FLFPR) Indonesia adalah persentase jumlah perempuan usia kerja yang bekerja atau mencari pekerjaan, dari seluruh

perempuan usia kerja di Indonesia. Di satu sisi, semakin tinggi nilai TPAKP dapat diartikan sebagai semakin baiknya penggunaan potensi sumber daya perempuan untuk memajukan kegiatan ekonomi Indonesia. Di sisi lain, semakin tinggi nilai TPAKP dapat pula diartikan semakin baiknya kesempatan kaum perempuan untuk berpartisipasi dalam ruang publik dan berkontribusi secara finansial guna meningkatkan kesejahteraan diri, keluarga, dan masyarakat sekitarnya.

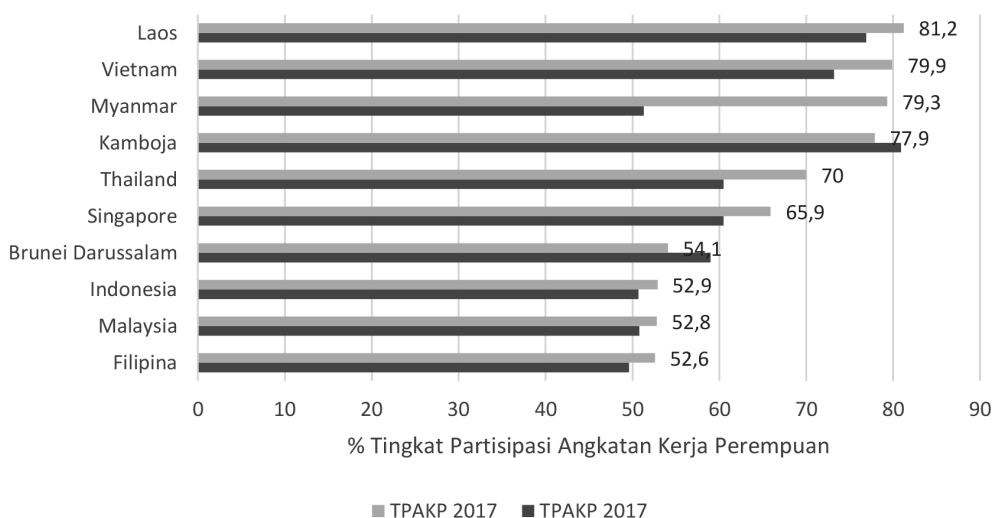
### **Mengapa Angka Partisipasi dan Kesempatan Ekonomi Perempuan Indonesia Relatif Rendah?**

Kembali ke pertanyaan awal, mengapa performa Indonesia dalam dimensi ekonomi di IKG 2017 tampak lebih buruk dari negara-negara tetangga di ASEAN? Ada dua penjelasan untuk menjawab pertanyaan ini. Pertama, memang TPAKP Indonesia relatif rendah dibanding negara ASEAN lainnya. Akan tetapi perbedaan struktur ekonomi antar negara menyebabkan variasi TPAKP yang signifikan di kawasan ini. Kita tidak dapat membandingkan TPAKP Indonesia dengan, misalnya TPAKP Kamboja, untuk kemudian menyimpulkan negara mana yang *lebih baik* atau *lebih egaliter* tanpa pembahasan lebih lanjut tentang konteks struktur ekonomi masing-masing negara. Pada umumnya, TPAKP cenderung *lebih*

tinggi di negara dengan proporsi penduduk yang tinggal di pedesaan juga relatif tinggi.

Figur 1 menggambarkan TPAKP di negara-negara ASEAN sesuai dengan data dari IKG (World Economic Forum 2017). Sebagai pembandingan, Figur 1 juga menampilkan data komparasi untuk perhitungan TPAKP estimasi model ILO (*ILO modelled estimates*) tahun 2017 yang sering dipakai sebagai acuan berbagai kajian

gender dan ketenagakerjaan. Ada beberapa perbedaan mencolok antara angka-angka TPAKP yang dikutip dari dua sumber data tersebut. Misalnya menurut IKG, TPAKP Myanmar mencapai 79%. Namun menurut estimasi ILO TPAKP Myanmar hanya mencapai kisaran 51,3%. Selain kerancuan data untuk Myanmar, secara garis besar estimasi TPAKP antar negara dari dua sumber data ini cukup konsisten.



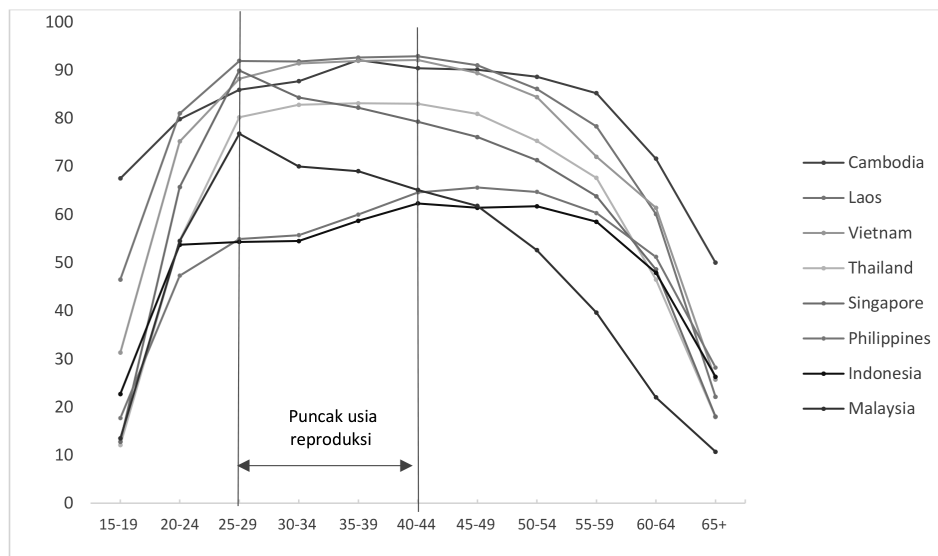
Figur 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAKP) di ASEAN, 2017  
 Sumber: 2017 ILO Modelled estimates (ILO 2018), dan World Economic Forum 2017

Satu hal yang tampak jelas dari Figur 1 adalah tingginya TPAKP untuk Laos, Vietnam, Myanmar, dan Kamboja dibanding negara ASEAN lainnya. Hal ini selaras dengan tingginya persentase penduduk di keempat negara tersebut yang tinggal di daerah pedesaan. Sebagai contoh, 77% dan 65% penduduk di Kamboja dan Vietnam tinggal di pedesaan pada tahun 2017. Sementara itu, persentase penduduk yang tinggal di daerah pedesaan relatif lebih rendah di Indonesia (45%), Filipina (53%), Malaysia (25%), dan Thailand (51%) (World Bank 2018).

Hipotesis Claudia Goldin (1994) menyatakan adanya kurva huruf U yang menggambarkan korelasi antara tingkat pendapatan per kapita dengan TPAKP. Pada umumnya, banyak penduduk negara dengan pendapatan per kapita yang relatif rendah bekerja di sektor pertanian di pedesaan. Dalam konteks masyarakat agraria ini lebih mudah bagi seorang perempuan untuk menggabungkan peran produktif dan reproduktifnya. Di sini, TPAKP cenderung tinggi. TPAKP berada pada titik paling rendah untuk negara-negara transisi dengan tingkat pendapatan menengah. Dalam konteks masyarakat transisi ini, formalisasi ranah pekerjaan membuat perempuan kesulitan untuk menjalankan

peran pekerjaan reproduktifnya dalam rumah tangga, dan peran dalam pekerjaan di luar rumah. Goldin berargumen bahwa peningkatan TPAKP akan terjadi dengan semakin meningkatnya pendapatan per kapita, seiring dengan meningkatnya pendidikan perempuan, dan turunnya angka fertilitas. Penelitian Malhotra (1997) menunjukkan bahwa untuk kasus Indonesia memang konteks sosial masyarakat urban tidak selalu lebih egaliter berkaitan dengan proses pernikahan dan peran gender—termasuk dalam pekerjaan—daripada konteks masyarakat di pedesaan.

Perbedaan dalam pola partisipasi angkatan kerja perempuan berdasarkan kelompok umur di negara yang didominasi wilayah pedesaan (versus perkotaan) juga dapat dilihat dalam Figur 2. Penurunan TPAKP tidak tampak signifikan pada umur-umur puncak reproduksi di negara-negara Indocina. Kecenderungan ini mendukung hipotesis bahwa dalam konteks masyarakat agraria relatif lebih kondusif bagi perempuan untuk memadukan kegiatan reproduktif dan kegiatan ekonomi. Pola TPAKP menurut kelompok umur menyerupai pola partisipasi angkatan kerja laki-laki pada umumnya (berbentuk seperti kurva huruf U terbalik).



Figur 2. Pola Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan sesuai kelompok umur dan negara, 2017  
Sumber: diolah dari ILO Female labour force participation rates modelled estimates 1990 and 2017  
(International Labor Organisation 2018)

Sebaliknya, di Singapura dengan 100% penduduknya tinggal di wilayah perkotaan, TPAKP mengalami penurunan drastis pasca kelompok umur 25 – 29. TPAKP Singapura tidak mengalami kenaikan setelah berakhirnya rentang umur puncak reproduksi. Pola yang sama juga terjadi di Malaysia yang mempunyai proporsi penduduk pedesaan relatif rendah. Walau pola Malaysia sejalan dengan pola TPAKP Singapura, patut dicatat bahwa TPAKP di Singapura jauh lebih tinggi dari Malaysia di setiap kelompok umur pasca 15-19 tahun. Di negara-negara maju Asia lainnya seperti Jepang dan Korea Selatan dijumpai pola TPAKP yang menyerupai kurva huruf M: perempuan cenderung keluar dari angkatan kerja pada kisaran umur 25-an dan mulai kembali lagi di usia 40-an setelah anak mereka cukup dewasa (Ochiai 2009).

Saat ini, gambaran umum pola TPAKP di Indonesia—dan juga Filipina—menunjukkan bahwa partisipasi angkatan kerja tertinggi justru terjadi di umur 40 – 44, ketika perempuan telah menyelesaikan tanggung jawab intensif seputar pengasuhan anak dan keluarganya. Pola ini cenderung tipikal untuk konteks negara berpendapatan menengah.

Singkat kata, perbandingan TPAKP antarnegara ASEAN tidak seperti membandingkan *apple to apple*. Sesuai dengan ekspektasi, kawasan Indocina dengan porsi masyarakat agraria yang besar mempunyai TPAKP yang lebih tinggi dari negara lain di ASEAN, termasuk Indonesia. Selain faktor struktur ekonomi, perbedaan pola keluar masuk angkatan kerja perempuan dan tinggi

rendahnya TPAKP di usia pasca perkawinan/kelahiran bisa digunakan sebagai salah satu *proxy* norma gender dalam keluarga dan masyarakat, serta dukungan negara untuk membantu perempuan berkarier dan berkeluarga dalam setiap negara tersebut. Walau TPAKP Thailand (70%) jauh lebih tinggi dari Indonesia (53%), TPAKP Indonesia relatif sama dengan Filipina—negara dengan peringkat terbaik IKG di ASEAN. Hal ini berkaitan dengan penjelasan berikutnya.

Kedua, ada komponen lain selain TPAKP yang digunakan untuk menghitung skor dan peringkat IKG dalam dimensi ekonomi. Walau Indonesia setara dengan Filipina dalam ukuran TPAKP, Filipina jauh lebih unggul dalam komponen proporsi perempuan di antara legislator, pejabat senior, dan manager. Di Indonesia, persentase perempuan di antara para pengambil keputusan ini hanya mencapai 22% (berarti dari semua pekerja pengambil keputusan, sisanya—88%—adalah laki-laki). Di Filipina, persentase untuk hal yang sama mencapai 47% (World Economic Forum 2017).

Selain itu, di Indonesia proporsi perempuan di antara pekerja profesional dan teknisi hampir mencapai paritas (49%). Namun di Filipina, lebih banyak jumlah perempuan (62%) daripada laki-laki (38%) yang bekerja sebagai profesional dan teknisi. Intinya, walau TPAKP di dua negara cenderung sama, masih ada banyak kisi-kisi lain yang membedakan corak dan sifat dasar (*nature*) dari kesenjangan gender dalam partisipasi ekonomi di kedua negara tersebut.

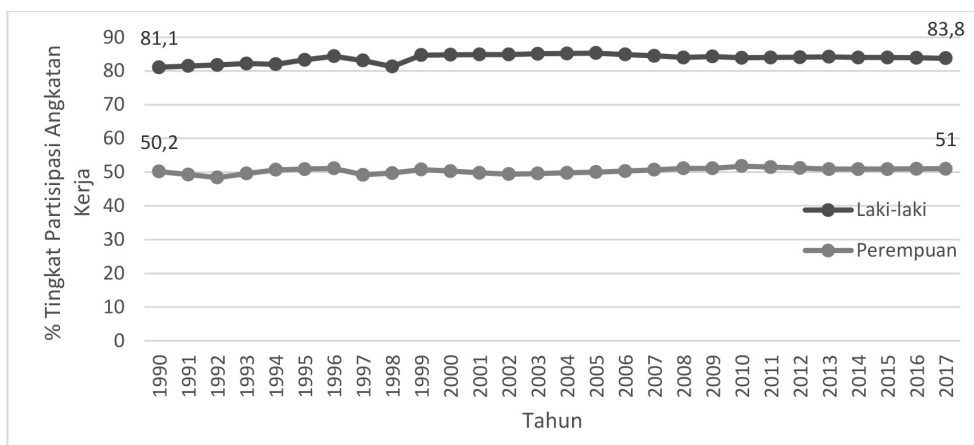
### Membaca Ulang “Stagnasi” Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Indonesia

Seperti diuraikan sebelumnya, hipotesis Goldin (1994) mengkaji hubungan antara proses pembangunan ekonomi dan tingkat partisipasi suatu negara. Di satu sisi, ada kemungkinan bahwa TPAKP Indonesia yang relatif rendah di tahun 2017 memang berkaitan dengan proses perubahan struktur ekonomi. Di sisi lain, beberapa kajian seputar partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia mengungkapkan bahwa ada alasan-alasan struktural lain yang membuat TPAKP perempuan Indonesia cenderung rendah. Beberapa kajian ini tampak sepakat menggunakan istilah *stagnasi* untuk mendeskripsikan tidak adanya perubahan TPAKP Indonesia dalam beberapa dasawarsa terakhir (lihat Figur 3).

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2016, h. 24), TPAKP Indonesia

tergolong rendah, dan berkisar di antara 48% – 53% dalam periode 2011 – 2015. Schaner dan Das (2016, h. 1) juga menggunakan kata stagnasi ketika menggambarkan evolusi TPAKP Indonesia dari tahun 1990 – 2011. Senada dengan Schaner dan Das, kajian Australia Indonesia Partnership for Economic Governance (2017a, h. 25) turut menggarisbawahi tren stagnasi TPAKP seputar angka 51% dalam periode 1990 - 2013. Patut dicatat bahwa dalam kurun waktu yang sama, telah terjadi pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan yang signifikan.

Secara garis besar, tidak dapat dipungkiri bahwa memang ada kendala mendasar yang menghambat partisipasi dan kesempatan ekonomi perempuan di Indonesia. Akan tetapi patut dipertanyakan ulang apakah konsep stagnasi TPAKP Indonesia ini bisa diartikan sebagai suatu kondisi *tanpa kemajuan* dalam dua – tiga dasawarsa terakhir.



Figur 3 “Stagnasi” Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Indonesia, 1990 – 2017  
 Sumber: Diolah dari International Labor Organisation 2018

Dari sumber data yang sama dengan beberapa kajian di atas, memang tidak tampak perubahan yang signifikan dalam tren TPAKP Indonesia. Data terakhir dari ILO menunjukkan TPAKP Indonesia untuk tahun 2017 berkisar di angka 51% (International Labor Organisation 2018). Angka ini hanya berbeda kurang dari satu poin persentase dari TPAKP tahun 1990 (50,2%). Namun tren *stagnasi* ini bisa dibayangkan. Ada beberapa perubahan signifikan dalam pola partisipasi angkatan kerja subkelompok perempuan yang tersembunyi di balik minimnya perubahan TPAKP umum ini.

Yang pertama adalah penurunan partisipasi kerja perempuan umur sekolah. Figur 4 membandingkan perbedaan antara TPAKP yang dihitung terpisah berdasarkan kelompok umur lima tahunan di tahun 1990 dan 2017. Disini tampak ada satu perbedaan nyata di

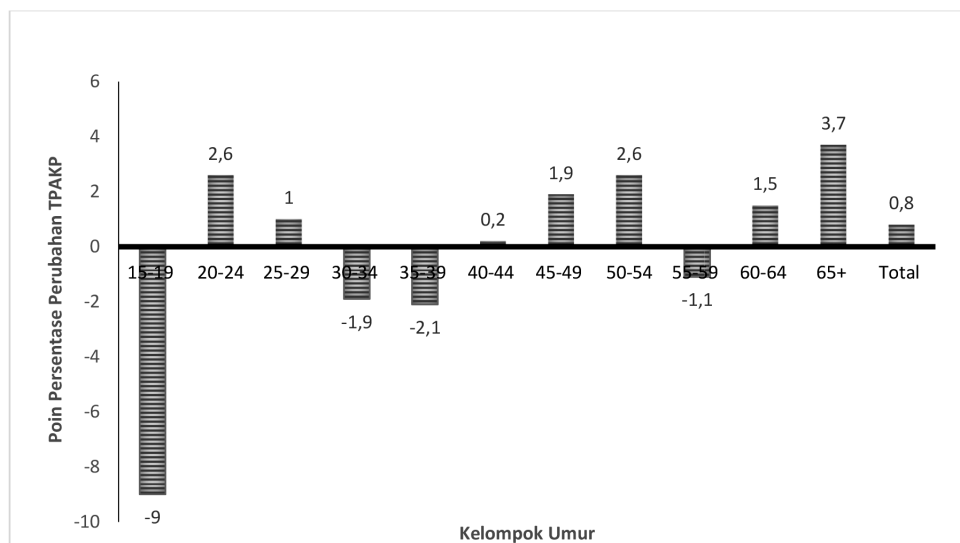
antara TPAKP 1990 dan 2017 yang dapat diartikan sebagai suatu *kemajuan*. TPAKP untuk perempuan dalam rentang usia sekolah 15-19 tahun yang lebih rendah sebanyak sembilan poin persentase di tahun 1990 daripada tahun 2017. Tren penurunan ini diimbangi dengan peningkatan partisipasi sekolah perempuan dalam jenjang SMA, akademi, dan perguruan tinggi.

Yang kedua, menurut Schaner dan Das (2016) tren stagnasi TPAKP Indonesia dapat dijelaskan dengan melihat perubahan pola partisipasi angkatan kerja perempuan dalam tiap kelompok umur, domisili (desa/kota), dan tingkat pendidikan tertentu. Schaner dan Das menemukan bahwa sejak 1990, telah terjadi peningkatan partisipasi angkatan kerja bagi perempuan muda yang tinggal di kota. Sebaliknya, di wilayah pedesaan, perempuan dengan usia relatif muda cenderung menarik

diri dari pekerjaan informal dan pekerjaan tanpa upah. Di level individu, Schaner dan Das juga menemukan hubungan berbentuk kurva huruf U antara partisipasi angkatan kerja perempuan dan level pendidikan dan kekayaan.

Artinya, tren stagnasi TPAKP di Indonesia dapat dijelaskan sebagai hasil dari meningkatnya partisipasi kerja perempuan dari rumah tangga kelas ekonomi atas, yang dibarengi dengan menurunnya partisipasi kerja perempuan dari keluarga kelas ekonomi rendah. Menurut Schaner dan Das, untuk kelompok perempuan

yang terakhir ini, kemungkinan untuk memilih tidak ikut berpartisipasi dalam angkatan kerja dimungkinkan karena naiknya tingkat kesejahteraan rumah tangga mereka seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Penafsiran Schaner dan Das tentang perubahan pola TPAKP antar subkelompok perempuan ini sejalan dengan hipotesis kurva huruf U yang dijabarkan oleh Goldin. Kajian mereka menggarisbawahi pentingnya kebijakan untuk memperluas akses terhadap pekerjaan yang bermakna dan berupah layak, bagi perempuan dari keluarga miskin dan kelas menengah bawah di Indonesia.



Figur 4. Perbedaan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Indonesia 1990 dan 2017 (Poin Persentase)  
Sumber: diolah dari ILO Female labour force participation rates modelled estimates 1990 and 2017  
(International Labor Organisation 2018)

### Tantangan di masa depan

Penjabaran di atas bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pembaca atas keterkaitan antara tren TPAKP dan proses besar perubahan sosial dan struktur ekonomi. Akan tetapi pembacaan kritis atas 1) laporan rendahnya TPAKP perempuan Indonesia di antara negara-negara tetangga, dan 2) tren stagnasi TPAKP selama hampir tiga dekade terakhir, tidak menampik fakta bahwa masih ada ruang lebar untuk memperbaiki partisipasi dan kesempatan ekonomi perempuan di Indonesia.

Beberapa kajian baru menempatkan peran reproduktif perempuan—melahirkan, mengasuh, dan membesarkan anak—sebagai faktor utama yang menyebabkan banyak perempuan tidak berpartisipasi dalam angkatan kerja di Indonesia (Australia Indonesia Partnership for Economic Governance 2017a; Schaner & Das 2016; Setyonaluri 2013). Lisa Cameron dan Diana Contreras-Suarez (Australia Indonesia Partnership for Economic Governance 2017b) menelusuri pola kerja 9.000 perempuan Indonesia selama 20 tahun.

Mereka menemukan sekitar 40% perempuan keluar dari angkatan kerja di tahun pertama setelah kelahiran anak pertama. Isu ini acap kali ditemukan pada mereka yang sebelumnya bekerja di sektor formal. Sebagian besar perempuan yang keluar dari sektor formal karena menikah dan melahirkan tidak kembali lagi untuk bekerja, baik di sektor formal maupun informal. Estimasi Cameron dan Contreras-Suarez mengidentifikasi bahwa selama kurun waktu analisis mereka, ada 8,6 juta perempuan di umur 20 sampai 44 tahun yang keluar dari angkatan kerja karena menikah dan punya anak.

Dari sudut pandang kebijakan, hal ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk diselesaikan. Kendala utama partisipasi kerja perempuan bersinggungan erat dengan norma peran gender dalam ranah keluarga. Lain halnya jika, misalnya faktor utama kesenjangan gender dalam partisipasi ekonomi adalah adanya sebuah undang-undang yang bersifat diskriminatif terhadap pekerja perempuan. Walau kajian dan upaya penghapusan instrumen hukum, dan praktik yang diskriminatif dalam

pasar kerja tetap harus terus berjalan, tak bisa dipungkiri bahwa langkah-langkah ini harus dilakukan bersamaan dengan upaya konkret—oleh negara dan pemberi kerja—untuk mengatasi konflik antara peran produktif dan reproduktif perempuan (dan laki-laki).

Untuk tataran kebijakan, baru-baru ini muncul berbagai inisiatif internasional yang menyerukan keberpihakan terhadap perempuan dengan narasi pembangunan ekonomi. Estimasi ILO untuk 2017 menunjukkan kesenjangan gender dalam partisipasi angkatan kerja di Indonesia berkisar di 32,7 poin persentase (TPAK Perempuan 51%, dan TPAK Laki-laki 83,7%). Hasil simulasi ILO menunjukkan bahwa jika Indonesia dapat bertahap membuka akses partisipasi angkatan kerja perempuan dan mengurangi seperempat saja dari besarnya angka perbedaan TPAK antar gender tahun 2017, maka di tahun 2025 Indonesia menuai bonus ekonomi yang signifikan: 8,6 juta perempuan bergabung masuk dalam angkatan kerja, dan penerimaan pajak serta Produk Domestik Bruto (PDB) juga akan bertambah sebanyak US\$216,2 miliar (International Labor Organisation 2017).

Tentunya, ada banyak alasan selain diskursus seputar potensi sumbangan ekonomi untuk negara dari peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan. Dalam karya pentingnya, Naila Kabeer (1999) berpendapat bahwa pemberdayaan perempuan seharusnya diartikan sebagai suatu proses dimana perempuan mampu membuat keputusan sendiri atas pilihan strategis seputar hidupnya—termasuk dalam ranah pekerjaan. Dalam konteks ini, TPAK bukanlah suatu indikator sempurna untuk menangkap seberapa besar jumlah perempuan yang mempunyai kontrol penuh dalam pilihannya untuk bergabung/keluar dari angkatan kerja. Misalnya banyak perempuan yang mengais rejeki sebagai pekerja tanpa upah, dan pekerja rentan di sektor formal dan informal. Walaupun dengan kondisi upah yang tak layak, tanpa kepastian kontrak yang jelas, dan tanpa perlindungan hukum atas hak-hak ketenagakerjaan lainnya, para perempuan ini acap kali tidak mempunyai opsi lain kecuali untuk bekerja, bertahan hidup, dan menyokong kebutuhan anak dan keluarganya.

*Pilihan penuh* menjadi kata kunci yang membuat analisis kuantitatif tren ketenagakerjaan perempuan—khususnya perempuan yang menikah dan/atau mempunyai anak—menjadi lebih rumit. Keputusan perempuan untuk bekerja atau tidak kerap tidak mencerminkan suatu preferensi sejati. Dengan kata lain, keputusan untuk bekerja atau tidak bekerja diambil melalui proses pertimbangan rumit karena adanya faktor kendala (*constraints*) tertentu (Bianchi & Milkie

2010; McRae 2003). Di satu sisi, kendala ini dapat berupa keadaan ekonomi yang tidak memadai, yang kemudian mengharuskan perempuan untuk bekerja dalam praktik eksploitatif seperti ilustrasi di atas. Di sisi lain, kendala juga bisa datang dari tidak adanya alternatif yang aman, memadai, dan terjangkau untuk pengasuhan anak; larangan dari suami/keluarga; keengganan pasangan untuk berbagi peran dalam rumah tangga yang lebih egaliter; kondisi pekerjaan di sektor formal yang tidak mendukung *work-family balance* baik untuk laki-laki maupun perempuan; dan suasana tempat kerja yang tidak ramah keluarga.

Dalam analisis suatu survei di Indonesia, Schaner dan Das (2016) menemukan setidaknya ada 25% perempuan tidak bekerja yang ingin dan siap untuk bekerja jika menemukan pekerjaan yang cocok. Dengan meminimalisir faktor-faktor kendala, ada ruang untuk intervensi kebijakan yang dapat menyokong perempuan agar mereka dapat lebih leluasa membuat pilihan untuk bekerja (atau tidak). Berbagai tantangan besar terkait perubahan sosial di masa mendatang memperkuat argumen ini.

Tantangan pertama adalah urbanisasi. Seperti ulasan di awal artikel, struktur masyarakat kota terkadang jauh lebih tidak kondusif terhadap partisipasi kerja perempuan daripada konteks masyarakat pedesaan. Di masa datang, derap urbanisasi akan menjadi tantangan tersendiri untuk lebih banyak perempuan dan keluarga di Indonesia. Setyonaluri dan Utomo (2016) menyorot pola partisipasi kerja perempuan di Jakarta yang mirip dengan pola di Singapura, yakni TPAK terus menurun secara signifikan sejak dari awal puncak usia reproduksi. Hasil awal dari studi kualitatif ini menemukan jarak tempuh dan lamanya waktu yang dihabiskan dalam kemacetan ibu kota sebagai salah satu alasan perempuan yang mempunyai anak masih kecil memutuskan untuk berhenti bekerja.

Tantangan kedua—yang berkaitan erat dengan urbanisasi—adalah perubahan struktur keluarga. Seiring dengan transisi demografi proses perubahan sosial, semakin sedikit individu yang tinggal bersama keluarga besarnya (Qibthiyah & Utomo 2016). Jika kebanyakan rumah tangga terdiri dari keluarga inti dan jauh dari jangkauan kerabat, maka opsi pengasuhan informal anak (melalui jejaring kerabat) di lingkungan perkotaan pun menjadi lebih sedikit. Studi dari World Bank memperkirakan bahwa ibu yang tinggal di kawasan perkotaan Indonesia kehilangan sekitar US\$1300 setiap tahun karena tidak ada opsi pengasuhan anak informal ini (Halim, Johnson & Perova 2017). Kebanyakan ibu

tanpa akses pengasuhan anak informal yang dulunya bekerja, kembali bekerja sebagai pekerja keluarga yang tidak dibayar (misal membantu usaha keluarga berjualan di warung). Sementara mereka yang kembali bekerja dan menghasilkan uang, cenderung mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang lebih rendah dari sebelumnya. Hingga saat ini, belum banyak sarana tempat penitipan anak (TPA) yang memadai dan terjangkau oleh segala lapisan masyarakat di kota-kota besar di Indonesia.

Tantangan ketiga—yang juga terkait dengan poin sebelumnya—adalah penuaan penduduk. Dengan semakin meningkatnya proporsi penduduk lanjut usia, generasi masa datang akan menemukan kesulitan untuk tidak hanya mengurus anak-anak mereka, tetapi juga mengurus orang tua mereka yang berusia lanjut (Grundy & Henretta 2006). Fenomena *sandwich generation* memang belum perlu untuk diprioritaskan saat ini di Indonesia. Akan tetapi dengan penuaan penduduk, konflik antara tanggung jawab keluarga dan pekerjaan tampaknya mempunyai potensi untuk meningkat di masa datang. Di tahun-tahun mendatang, ada potensi peningkatan beban fiskal negara untuk menanggung kesehatan dan kesejahteraan penduduk lansia. Salah satu resep kebijakan untuk mengantisipasi hal ini adalah melalui penguatan akses perempuan usia produktif untuk bekerja (Bloom & Finlay 2009).

Tantangan-tantangan di atas bertumpu pada sudut pandang perempuan dan keluarganya. Tentu yang tak kalah penting adalah tantangan terkait pasar kerja. Saat ini, masih sedikit kajian akademis di Indonesia yang menyoroti pengaruh perubahan teknologi terhadap kesempatan kerja perempuan. Apakah dampak *industry 4.0* terhadap partisipasi kerja perempuan? Bagaimana keluarga menyikapi semakin berkurangnya porsi pekerjaan yang bersifat permanen di sektor formal? Pertanyaan-pertanyaan ini patut menjadi agenda penelitian pada masa mendatang.

## Penutup

Layaknya indikator lain, pembacaan terhadap tren indikator partisipasi ekonomi perempuan perlu dilakukan dengan hati-hati. Ulasan di atas mengajak pembaca untuk lebih kritis dalam pembacaan tren TPAKP Indonesia dalam konteks komparatif, baik antarnegara maupun antar waktu. Namun tidak dapat ditampilkan bahwa kesenjangan gender dalam partisipasi ekonomi di Indonesia dan dalam tataran global merupakan isu sosial ekonomi yang layak mendapat perhatian negara.

Dengan pertimbangan-pertimbangan ulasan di atas,

upaya peningkatan akses partisipasi dan kesempatan ekonomi perempuan di Indonesia adalah pekerjaan rumah kita bersama. Di satu pihak, upaya mempromosikan norma peran gender yang lebih egaliter dalam keluarga berpotensi mendorong partisipasi kerja perempuan. Di pihak lain, ada kaitan erat antara norma peran gender dalam keluarga dengan struktur atau kondisi dunia kerja itu sendiri. Misalnya jam kerja yang mengikat, waktu *commuting* yang panjang, dan stres pekerjaan yang berlebih acap kali mempersulit perubahan pola asuh yang lebih egaliter dalam rumah tangga.

Bagaimana negara—dan juga sektor swasta sebagai pemberi kerja—dapat berperan lebih banyak agar laki-laki dan perempuan mampu membuat keputusan ketenagakerjaan yang sesuai dengan keinginan dan kepentingan keluarga mereka? Diperlukan terobosan inovatif untuk memecahkan permasalahan ini. Jurnal Perempuan mempunyai posisi unik dan penting sebagai wadah diskusi interdisipliner untuk menimbang dan mempelajari berbagai opsi dan strategi kebijakan yang dapat diaplikasikan dalam konteks kemajemukan keluarga di Indonesia.

## Daftar Pustaka

- Australia Indonesia Partnership for Economic Governance 2017a, *Women's Economic Participation in Indonesia*, dilihat 1 Maret 2018, <https://www.monash.edu/business/cdes/research/publications/publications2/Womens-economic-participation-in-Indonesia-June-2017.pdf>
- Australia Indonesia Partnership for Economic Governance 2017b, *Women's Transitions in the Labour Market around Marriage and Childbearing*.
- Beneria, L 1981, "Conceptualizing the labor force: The underestimation of women's economic activities", *The Journal of Development Studies*, vol. 17, no. 3, hh. 10-28, doi:10.1080/00220388108421795
- Bianchi, SM & Milkie, MA 2010, "Work and Family Research in the First Decade of the 21st Century", *Journal of Marriage and Family*, vol. 72, no. 3, hh. 705-725.
- Bloom, DE & Finlay, JE 2009, "Demographic change and economic growth in Asia", *Asian Economic Policy Review*, vol. 4, no. 1, hh. 45-64.
- Folbre, N 2006, "Measuring Care: Gender, Empowerment, and the Care Economy", *Journal of Human Development*, vol. 7, no. 2, hh. 183-199, doi:10.1080/14649880600768512
- Goldin, C 1994, *The U-shaped female labor force function in economic development and economic history*, No. w4707, National Bureau of Economic Research, dilihat 1 Agustus 2018, <https://www.nber.org/papers/w4707>
- Grundy, E & Henretta, JC 2006, "Between elderly parents and adult children: a new look at the intergenerational care provided by the 'sandwich generation'", *Ageing & Society*, vol. 26, no. 5, hh. 707-722.

Halim, D, Johnson, H & Perova, E 2017, *Could Childcare Services Improve Women's Labor Market Outcomes in Indonesia?* dilihat 1 Oktober 2018, <http://documents.worldbank.org/curated/en/855851490958133680/pdf/113927-BRI-PUBLIC-EAP-abstract-sent.pdf>

International Labor Organisation 2017, *Gender gaps in the labour market: Indonesia*, dilihat 1 Oktober 2018, [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms\\_558033.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_558033.pdf)

International Labor Organisation 2018, ILOSTAT, dilihat 8 October 2018, <https://www.ilo.org/ilostat/>

Kabeer, N 1999, Resources, Agency, Achievements: Reflections on the Measurement of Women's Empowerment, *Development and Change*, vol. 30, no. 3, hh. 435-464, doi:10.1111/1467-7660.00125

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak 2016, *Potret Ketimpangan Gender dalam Ekonomi*, dilihat 15 September 2018, <https://www.kemempapa.go.id/lib/uploads/list/a68a6-buku-statistik-gender-tematik-2016-page-1-35.pdf>

Malhotra, A 1997, "Gender and the Timing of Marriage: Rural-Urban Differences in Java", *Journal of Marriage and Family*, vol. 59, no. 2, hh. 434-450, doi:10.2307/353481

McRae, S 2003, "Constraints and Choices in Mothers' Employment careers: a Consideration of Hakim's Preference Theory", *The British Journal of Sociology*, vol. 54, no. 3, hh. 317-338, doi:10.1111/j.1468-4446.2003.00317.x

Ochiai, E 2009, "Care Diamonds and Welfare Regimes in East and South-East Asian Societies: Bridging Family and Welfare Sociology. *International Journal of Japanese Sociology*, 18(1), 60-78. doi:doi:10.1111/j.1475-6781.2009.01117.x

Qibthiyah, R & Utomo, AJ 2016, "Family Matters: Demographic Change and Social Spending in Indonesia", *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, vol. 52, no. 2, hh. 133-159.

Schaner, S & Das, S 2016, *Female Labor Force Participation In Asia: Indonesia Country Study*, dilihat 15 September 2018, <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/180251/ewp-474.pdf>

Setyonaluri, D 2013, *Women Interrupted: Determinants of Women's Employment Exit and Return in Indonesia*, tesis doktor, The Australian National University, Canberra.

Setyonaluri, D & Utomo, AJ 2016, *Negotiating work, family and the traffic: narratives on married women's employment in Jakarta*, Kertas Kerja, [http://www.smeru.or.id/sites/default/files/events/d2\\_presentation\\_4\\_ariane\\_utomo.pdf](http://www.smeru.or.id/sites/default/files/events/d2_presentation_4_ariane_utomo.pdf)

Waring, M & Steinem, G 1988, *If women counted: A new feminist economics*, Harper & Row, San Francisco.

World Bank 2018, *Rural Population (% of Total Population)*, dilihat 7 October 2018 [https://data.worldbank.org/indicator/SP.RUR.TOTL.ZS?year\\_high\\_desc=false](https://data.worldbank.org/indicator/SP.RUR.TOTL.ZS?year_high_desc=false)

World Economic Forum 2017, *The Global Gender Gap Report 2017*, dilihat 15 September 2018, [http://www3.weforum.org/docs/WEF\\_GGGR\\_2017.pdf](http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2017.pdf)

### Catatan akhir

- 1 Lihat misalnya <https://tirto.id/karier-mayoritas-perempuan-indonesia-cenderung-stagnan-cwA1>, <https://economy.okezone.com/read/2017/12/21/320/1834261/hari-ibu-menkeu-sayangkan-partisipasi-tenaga-kerja-wanita-di-indonesia-stagnan>, <http://www.koran-jakarta.com/partisipasi-angkatan-kerja-perempuan-di-indonesia-rendah/>; <http://finansial.bisnis.com/read/20181108/9/858028/bappenas-partisipasi-perempuan-dalam-dunia-kerja-masih-rendah>

## **Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari**

1. Prof. Sylvia Tiwon (University of California, Berkeley)
2. Prof. Dr. Musdah Mulia (UIN Syarif Hidayatullah)
3. Dr. Widjanti M Santoso (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)
4. Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo (Universitas Indonesia)
5. Dr. Pinky Saptandari (Universitas Airlangga)
6. Ruth Indiah Rahayu, M. Fil. (Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara)



## ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

**Jurnal Perempuan** (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan menguraikan persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, autentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada ([redaksi@jurnalperempuan.com](mailto:redaksi@jurnalperempuan.com)).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan subbagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa subbab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Metode Penelitian** berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam subbab-subbab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan/atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/ temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Akhir** (*endnote*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum 2003) untuk dua pengarang, (Candraningrum, Dhewy & Pratiwi 2016) untuk tiga pengarang, dan (Arivia et al. 2003) untuk empat atau lebih pengarang. Contoh:  
Arivia, G 2003, *Filsafat Berperspektif Feminis*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.  
Amnesty International (AI) 2010, *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*, diakses pada 5 Maret 2016, [http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational\\_for\\_PSWG\\_en\\_Indonesia.pdf](http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf)  
Candraningrum, D (ed.) 2014, *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.  
Dhewy, A 2014, "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election", *Indonesian Feminist Journal*, vol. 2 no. 2, h. 130-147.  
"Sukinah Melawan Dunia" 2014, *KOMPAS*, 18 Desember, diakses 20 Desember 2014, <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi [redaksi@jurnalperempuan.com](mailto:redaksi@jurnalperempuan.com) untuk mendapatkan petunjuk.

YAYASAN  
**YJP**  
JURNAL  
PEREMPUAN

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A  
Jati Padang, Pasar Minggu,  
Jakarta Selatan 12540  
INDONESIA  
Phone/Fax: +62 21 22701689

